

TANTANGAN PRESIDEN INDONESIA MENDATANG, DAN RELEVANSI ‘MULTIPLICATION AUTHORITIES’ SINGAPURA

CHALLENGES FOR THE NEXT PRESIDENT OF INDONESIAN AND THE RELEVANCE OF SINGAPORE “MULTIPLICATION AUTHORITIES”

Zainuddin Djafar

Guru besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Jalan prof. Dr. Surjono D Pusponegoro, Kampus UI Depok 16424
E-mail: zainuddin_djafar@yahoo.com

Diterima: 26 Juli 2013; direvisi: 21 Agustus 2013; disetujui: 28 November 2013

Abstract

This writing is going to observe the significant challenge for the next of Indonesian President (after 2014). Some observations have been done, and some important views on individual strength leadership seem not enough. The leadership of next Indonesian president should also reconsider its role in order to cope with the major of Indonesian national problem especially with the issue of corruption. Singapore has shown of its management of success in handling its cronic problem of corruption. The Singaporean Prime Minister leadership has given substantial lesson learned, and indirectly the concept of Multiplication Authorities has shown its validity including several strategies that should also be regarded as the main mission for the next Indonesian president.

Keywords: Indonesian next president, Singaporean Multiplication Authorities

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan observasi pada hal-hal terkait dengan tantangan yang signifikan bagi calon presiden Indonesia mendatang (pasca 2014). Dalam hal itu observasi sudah dilakukan, dan pandangan pada hal-hal yang terkait dengan kekuatan maupun kelebihan kepemimpinan seseorang tampak tidak cukup. Kepemimpinan bagi presiden Indonesia mendatang juga harus memperhitungkan perannya untuk dapat mengatasi masalah besar bangsa khususnya dalam hal makin kronisnya problema korupsi. Singapura dengan manajemen suksesnya telah berhasil mengatasi soal korupsi yang juga demikian kronik di negaranya. Perdana Menteri Singapura telah memberi berbagai pelajaran yang berharga, termasuk berbagai strategi yang perlu dipertimbangkan yaitu dengan memperhatikan relevansi prinsip “*Multiplication of Authorities*”, yang telah terbukti validitasnya, dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian bagi kepemimpinan Presiden Indonesia mendatang.

Kata kunci: Presiden Indonesia mendatang, dan Multiplikasi Otoritas Singapura

Pendahuluan

Konteks “*Multiplication of Authorities*” (MA) sebagai suatu konsep menjadi perhatian dan sorotan utama dari penulisan ini. Intinya, banyak negara yang berhasil dalam merealisasikan berbagai kebijakan domestiknya dalam mengatasi persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan kronis sifatnya, dan cenderung menerapkan konsep MA secara

optimal, konkrit, dan strategis. Konsep MA yang menjadi penekanan James N. Rosenau melihat bahwa realisasi suatu *order* (aturan kebijakan) yang sudah disepakati oleh suatu pemerintahan di suatu negara tidak luput dari berbagai fragmentasi (perbedaan).¹ Perbedaan antara aturan suatu kebijakan dan fragmentasi

¹ James N. Rosenau, *The Study of World Politics (Vol.2), Globalization and Governance*, (London: Routledge, London, 2006), hlm. 13-18.

tersebut tidak dapat dan tidak mudah untuk dapat diatasi begitu saja atau bersifat otomatis, tanpa suatu upaya yang kuat dan serius untuk menuju suatu keberhasilan.

Rosenau pada dasarnya menekankan bahwa *order* dan *fragmentation* penuh dengan tatanan nilai, dan tidak otomatis suatu *order* akan menjadi suatu *order* yang dipatuhi oleh semua pemutus dan pelaksana suatu kebijakan.² Karena itu suatu *order* dapat menjadi *disorder* bagi pembuat keputusan maupun pihak lainnya, jika suatu konteks kebijakan tidak dipahami secara tepat oleh pihak-pihak lainnya di berbagai lembaga di tingkat eksekutif misalnya. Hal ini menurut Rosenau makin terasa penting di suatu pemerintahan yang mendeklarasikan sebagai suatu negara demokrasi, dan tentunya suatu kebijakan (*order*) tetap harus mengutamakan prinsip dan azas demokrasi yang tidak bersifat tirani maupun *impurity* (semau-maunya) yang justru dapat menimbulkan *chaos*.³ Prinsip demokrasi juga harus mengutamakan *centralized democracy* atas kebijakan-kebijakannya yang tentunya konteks *Multiplication of Authorities* (MA) makin penting dan relevan dalam menghadapi problema kompleksnya korupsi di Indonesia. Prinsip kebijakan MA yang berlapis dan menjadi suatu kekuatan bersama antar lembaga-lembaga pemerintah, dalam melakukan pemberantasan korupsi maupun KKN di Indonesia menjadi kunci penting di masa mendatang. Singapura dengan berbagai lembaga anti korupsinya *Prevention of Corruption Ordinance* (POCO) dan *Corrupt Practice Investigation Bureau* (CPIB) yang sekaligus bersinergi dan multiplikatif sifatnya dengan pihak-pihak terkait lainnya (Perdana Menteri, Parlemen, Kepolisian, Pengadilan, dan aparat hukum lainnya), menjadi bukti penting bagi keberhasilan negara tersebut sebagai negara yang masuk kategori “*clean government*” dari korupsi di Asia Tenggara saat ini.

Sampai kini isu dan problema korupsi (KKN) di Indonesia makin kompleks dan makin banyak keinginan dari berbagai pihak agar presiden mendatang pasca 2014, tidak hanya berjanji untuk mengatakan tidak pada korupsi atau menjadi pemimpin terdepan dalam hal pemberantasan korupsi, tetapi diperlukan suatu *leadership* dan kebijakan yang jelas, berani dan tegas. Intinya perlu diciptakan kebersamaan

tujuan dan tindakan semua otoritas di tingkat eksekutif yang berlapis sifatnya (termasuk lembaga-lembaga terkait), dan minimal “kasus Singapura” perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, relevansi MA tersebut tampak makin signifikan.

Lebih jauh, muncul berbagai berita utama di media cetak, dan salah satu tema yang cukup signifikan yaitu ‘Dicari Pemimpin Mau Urus Rakyat’, lebih jauh ditegaskan bahwa kepemimpinan seorang presiden pada pasca pemilu 2014, diharapkan agar Indonesia dapat dipimpin oleh sosok pemimpin yang bersih, tegas, dan berintegritas.⁴ Sosok presiden tersebut juga diharapkan bersifat pluralis, berani mengambil resiko, serta dekat dan mampu menggerakkan rakyat pada umumnya.⁵

Keinginan akan sosok kepemimpinan presiden yang demikian tersebut di atas, tampak tidak terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; pertama, konteks kepemimpinan yang diperankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun terakhir ini terkesan ‘tidak pada format kepemimpinan yang tegas’ khususnya menghadapi permasalahan korupsi, yang sudah demikian menggurita, dan mengakar pada seluruh elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut makin menjadi masalah karena pasca era reformasi dan 15 tahun kemudian (2013), sesuai dengan realitas indikator yang ada, korupsi di republik ini dan khususnya di kalangan birokrasi pemerintahan makin menjadi-jadi, dan jauh lebih buruk kondisinya dibandingkan pada era sebelum reformasi yaitu di masa Orde Baru. Persoalan korupsi maupun KKN sangat sulit diberantas dan dituntaskan kalau para pemimpin di berbagai lembaga pemerintahan, dan termasuk presiden sendiri masih mempunyai “kepentingan”, dan tidak benar-benar tuntas menghadapi serta berani mengakhiri kondisi bangsa yang carut marut dengan problema korupsi tersebut.

Kedua, pengalaman Singapura menunjukkan dengan tegas bahwa seorang presiden ataupun kepala pemerintahan tidak boleh terlibat maupun ikut campur dengan hal-hal yang dilakukan oleh semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nya Singapura, yaitu POCO maupun CPIB yang merupakan ‘*Anti-Corruption Agency*’. Ketiga,

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ ‘Dicari Pemimpin Mau Urus Rakyat’, *Harian Kompas*, 31 Mei 2013, hlm. 1-5, Jakarta.

⁵ *Ibid.*

sebagaimana diketahui Singapura pada tahun 1958 adalah termasuk negara terkorup di Asia dan kronis sifatnya. Namun, karena kegigihan para pemimpinnya bahwa tumbuh suburnya korupsi di negara pulau tersebut semata-mata dapat menjadi bencana yang berkepanjangan, dan Singapura tidak akan mampu menjadi *'welfare state country'*, dengan *'Management of Success'*-nya di hampir semua bidang kehidupan.⁶ Karena itu Singapura harus bersih dari korupsi, dan pemerintahan yang bersih itulah yang harus diperkenalkan dan menjadi daya penarik tersendiri pada dunia internasional, sehingga Singapura dengan amat terbatas bahkan tidak mempunyai sumber daya alam yang patut dibanggakan (kecuali pelabuhan dengan air terdalam di dunia – *deep seaport*), tetap dapat eksis dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, bisnis, transaksi terbesar jual beli saham dan keuangan di Asia dan dunia umumnya yang diakui kredibilitasnya.

Keempat, kasus Singapura dengan indeks bebas korupsi tertinggi di dunia perlu mendapat perhatian serius. Lebih dari itu, keberhasilan Singapura harus dilihat juga sebagai *'best-practices'* yang valid dan terjadi di lingkungan ASEAN, serta di depan mata bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana diketahui, China sendiri pada tahun 1978 khususnya Perdana Menteri Deng Xiao Ping beserta rombongan delegasinya sejumlah 400 orang yang merupakan seluruh walikota, dan bupati, serta aparat birokrat pemerintahannya berkunjung ke Singapura, dan untuk mengetahui langsung mengapa Singapura hanya sekitar 20 tahun kemudian (1978), sudah menjadi negara dengan tingkat prestasi indeks anti korupsinya yang paling terbaik di dunia.⁷ Deng Xiao Ping lebih jauh bertanya pada dirinya, mengapa China tidak dapat meniru cerita sukses Singapura dalam hal pemberantasan korupsi tersebut?. Hal-hal apa atau *'magic-factor'* apa yang perlu disimak dari kasus Singapura tersebut?.

Akhirnya, China dalam 5-10 tahun terakhir berhasil mengikuti jejak Singapura, dan kini dikenal sebagai negara yang juga amat tegas untuk melakukan *'pembersihan'* para

koruptor dan langsung dihukum mati, kalau memang terbukti melakukan tindakan korup baik terhadap negara, dan masyarakat China umumnya. Banyak pihak selalu meremehkan bahwa pada suatu negara yang demikian besar jumlah penduduknya, maka akan sulit untuk dilakukan suatu pemberantasan korupsi, bahkan tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan korupsi sudah demikian kronis, dan menggurita seperti lingkaran setan, serta sulit membedakan konteks sebab-akibatnya.

Indonesia juga harus menyimak pada kasus-kasus korupsi yang terjadi pada China, kalau dilihat dan diperbandingkan penduduk Indonesia (240 juta) dan China (1,3 milyar), maka kondisi dan konteks China jauh lebih rumit, dan lebih sulit kalau memang soal pemerintahan yang bersih tersebut mau ditegakkan. Jadi di sini persoalan kepemimpinan politik atau siapa yang menjadi presiden di suatu negara menjadi kunci penting atas berhasil atau tidaknya negara tersebut dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tantangan utama bagi presiden Indonesia mendatang tidak hanya sekedar bersih, tegas, dan berbagai identitas lainnya. Tapi yang paling penting negara dan bangsa ini harus dapat bebas dari virus KKN yang sudah demikian kronis sifatnya, dan terjadi selama puluhan tahun.

Berbagai Upaya Pemberantasan Korupsi

Di tahun 2011-12 penulis bersama tim kecil telah melakukan penelitian yang dikelola oleh DRPM UI, khususnya penelitian tersebut merupakan Riset Unggulan Universitas Indonesia (RUUI); terutama menyangkut tema, "Lemahnya Pemberantasan Korupsi, dan Inefisiensi Birokrasi, Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Indonesia dengan ASEAN 3 (Singapura, Malaysia, dan Thailand)". Salah satu temuan utama dari penelitian tersebut dan merupakan hasil beberapa Focus Group Discussion (FGD) di Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta studi literatur dan berbagai in-depth interview yang dilakukan di keempat negara (termasuk Indonesia) tersebut, maka tingkat inefisiensi birokrasi dan lemahnya pemberantasan korupsi dengan jumlah total prosentasenya khusus untuk Indonesia cukup tinggi (32, 2%), dan menjadi beban bagi biaya produksi suatu produk barang baik yang akan diekspor, maupun realisasi

⁶ Terence Chong (Ed.), *Management of Success, Singapore Revisited*, (Singapore: ISEAS, 2010), hlm. 1-17.

⁷ Jon S.T. Quah, *Public Administration Singapore Style*, (Singapore: Emerald Group Publishing, 2010), hlm. 230.

produk yang menjadi konsumsi di dalam negeri.⁸ Konstelasi beban biaya dalam dua hal tersebut bagi Indonesia jauh melebihi dengan apa yang terjadi di Singapura (0%), Malaysia, dan Thailand, masing-masing hanya berkisar 10%.

Dengan angka maupun indikator prosentase tersebut di atas, menunjukkan bahwa inti maupun klimaks dari pemberantasan korupsi yang dilakukan di era Presiden SBY belum memberikan hasil-hasil yang dapat mengakhiri berbagai pungutan, maupun biaya ilegal yang masih tampak demikian tinggi, baik di tingkat aparat birokrasi pemerintahan umumnya, dan di kantor urusan pajak khususnya. Kendatipun sejak awal Presiden SBY dalam kampanye politik untuk pemilu dan di era pemerintahannya pada 2009-2014, selalu menekankan bahwa 'Saya (presiden) akan selalu berada di posisi paling depan' untuk tetap melakukan pemberantasan korupsi. Namun, Indonesia dalam prakteknya tetap saja kedodoran dan masih berada pada posisi negara yang paling korup di dunia, maupun di Asia khususnya.

Lebih jauh lagi, setelah mengamati investigasi yang dilakukan oleh Michael E. Portillo (Profesor dari MIT, Harvard University, Amerika Serikat), bahwa konteks korupsi yang masih demikian besar problematiknya dan pengaruhnya di beberapa negara di Asia, ternyata tidak hanya terbatas pada dua indikator tersebut di atas.⁹ Karena argumentasi Portillo tersebut lebih jauh lagi melihat secara komprehensif ada 17-19 indikator yang bersifat non-ekonomi dan bersifat makro-ekonomi yang menyebabkan dua indikator utama (lemahnya pemberantasan korupsi, dan inefisiensi birokrasi), tampak tumbuh subur, dan menjadi amat sulit diatasi atau dihentikan oleh hanya peran seorang presiden yang berstatus sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara di suatu negara di lingkungan ASEAN khususnya.

⁸ Laporan Penelitian Zainuddin Djafar dan Tim, "Lemahnya Pemberantasan Korupsi, dan Inefisiensi Birokrasi, Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Indonesia dengan ASEAN 3 (Singapura, Malaysia, dan Thailand)", (Jakarta: RUT UI, DRPM UI, 2011-2012).

⁹ Michael E. Portillo, Marn-Heong Wong, Rakhi Shankar, Ruby Toh, and Christian Ketels, *ASEAN Competitiveness Report*, (Singapore: Asia Competitiveness Institute, National University Singapore, 2010), hlm. III.

Konklusi sementara tersebut tampak relevan dalam melihat kasus Indonesia terutama pada empat tahun terakhir ini. Hal-hal yang terlihat, terutama dari kepemimpinan SBY yang masih menitikberatkan dan berorientasi pada penanganan KKN atas kasus-kasus yang tidak membahayakan dirinya dan 'orang-orang' terdekatnya, tetapi pada berbagai masalah besar (Century, Hambalang, dan LAPINDO) tampak semakin tidak jelas arahnya, dan demikian lamban eksekusinya. Diketahui oleh masyarakat umumnya, bahwa keterlibatan tokoh-tokoh penting dari Partai Demokrat terhadap kasus Hambalang tampak tidak atau belum mampu disentuh sampai akhir Juni 2013 ini. Padahal penanganan terhadap kasus-kasus KKN yang muncul di permukaan tersebut belum dapat diandalkan untuk menghentikan korupsi-korupsi lainnya.

Problema Indonesia

Salah satu konsekuensi dari perkembangan KKN di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan seorang pemimpin baru pasca 2014 yang lebih baik dari era sebelumnya, dan lebih tegas serta berbagai konotasi penting lainnya yang menjadi harapan masyarakat umumnya agar salah satu masalah atau problema besar Indonesia dalam soal korupsi maupun KKN dapat diselesaikan secara tuntas.¹⁰ Jelas tidak tepat kalau Indonesia dalam 5 tahun mendatang (pasca 2014), masih terus menghadapi berbagai soal korupsi yang tiada habisnya. Hal tersebut bukan saja menghambat, tapi juga secara sistematis akhirnya dapat menghancurkan efektifitas peran dan fungsi pemerintahan yang 'normal' sifatnya.

Situasi Indonesia yang terus-menerus dilanda kasus-kasus korupsi baru, dan diikuti dengan berbagai penahanan dan tersangka baru terhadap para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia, serta sampai kini ditandai dengan tingkat kebocoran pada keuangan negara yang masih cukup besar yaitu berkisar 34,6%. Hal tersebut sudah lama digambarkan dan dibenarkan oleh pengamat asing bahwa Indonesia memang sejak masa Orde baru telah mengalami problema KKN yang demikian akut, dan Indonesia disebut sebagai '*Fragile State*' (negara yang lemah, dan sewaktu-waktu

¹⁰ Zainuddin Djafar, *Rethinking The Indonesian Crisis*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2006).

dapat pecah/bubar).¹¹ Kesadaran akan perlunya Indonesia keluar dari konstelasi *'fragile-state'* tersebut, seharusnya menjadi inspirasi bagi semua pimpinan tertinggi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh jajarannya di seluruh pemerintahan daerah di 33 provinsi. Namun, kesadaran tersebut dapat dikatakan belum tumbuh dengan kuat sampai dengan 15 tahun kemudian sejak era reformasi (1997/98).

Memang masih ada kesadaran agar Indonesia dapat keluar dari kemelut korupsi maupun KKN yang akut tersebut, tapi sifatnya masih terbatas pada pihak-pihak yang umumnya berada di luar pemerintahan. Mereka umumnya adalah para pengamat hukum, akademisi, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, serta orang-orang muda yang dapat dikatakan 'kalah kuat' untuk menghentikan korupsi maupun KKN dalam 15 tahun terakhir ini. Seharusnya pihak pemerintah dan birokrasinya secara konsekuen dan sistimatis, tampil dan muncul serta berani membersihkan dirinya sendiri. Karena dalam kasus *'good-governance'*-nya Singapura, kepemimpinan politik dari penguasa tertinggi (perdana menteri maupun presiden) yang demikian kuat harus hadir terlebih dulu eksistensinya, yang sekaligus menjadi motor dalam menghentikan berbagai kemelut korupsi yang demikian dahsyat masalahnya.

Indonesia dengan problema korupsi dan KKN-nya yang sudah demikian akut, dan menjadi gejala di seluruh lini kehidupan pemerintahan, dan masyarakat, serta masih menjadi perih sulit diberantas dalam 15 tahun terakhir ini (pasca reformasi 1997/98), adalah realitas yang tidak dapat dianggap remeh. Berbagai semboyan maupun kampanye politik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dalam dua periode kepemimpinannya (sejak 2004), tampak hanya berhasil sebagai teriakan-teriakan yang bersifat gertakan-gertakan saja baik terhadap pihak lain, maupun terhadap dirinya sendiri dan koleganya di Partai Demokrat. Teriakan-teriakan tersebut hanya bersifat retorika, dan ternyata mereka yang berteriak dan diiklankan di media tayang, kini maupun dalam beberapa tahun terakhir (sebelum 2013) masuk dalam orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

¹¹ Michael R. J. Vatikiotis, *Indonesian Politics Under Soeharto, The Rise and Fall of The New Order*, (London & New York: Routledge, 1998), hlm. 204-217.

Pada prakteknya hal-hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi tantangannya makin hebat, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan berbagai kampanye yang justru dilakukan oleh Presiden SBY dan orang-orang dekatnya. Apalagi mereka yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka adalah orang-orang muda di Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa tantangan bagi eksistensi presiden di masa mendatang, dan terkait dengan persoalan korupsi dan KKN makin sulit, dan tidak mudah lagi untuk dapat menarik kepercayaan umumnya dari rakyat Indonesia. Kuatnya dukungan dan kepercayaan rakyat umumnya terhadap persoalan korupsi dan KKN adalah modal penting yang tidak dapat ditawarkan lagi, dan menjadi legitimasi politik yang seharusnya dipertahankan dan diperhitungkan oleh siapapun yang menjadi presiden Indonesia di masa mendatang.

Namun, hanya mengandalkan pada satu orang pemimpin saja atau seorang presiden saja, jelas tidak cukup karena permasalahan yang menyangkut isu korupsi dan KKN sudah demikian dahsyat masalah dan implikasinya. Bahkan hampir-hampir banyak pihak sudah demikian pesimis, dan tidak mungkin kalau Indonesia hanya mengandalkan pada seorang pemimpin saja, kendatipun pemimpin tersebut tampak demikian hebat konotasi pujian kredibilitas dan keberaniannya.

Kekhawatiran terhadap soal kepemimpinan presiden Indonesia di masa mendatang tampak cukup beralasan. Pertama, rakyat Indonesia umumnya tidak mau lagi salah dalam memilih pemimpinnya, terutama presidennya yang sudah dipilih langsung sejak 2004. Kedua, bobot pada kredibilitas atas calon presiden di masa mendatang demikian tinggi tuntutan. Ketiga, biaya untuk pemilihan presiden tersebut tidak mungkin terlaksana dengan dukungan uang rakyat yang kecil dan terbatas. Ketiga hal tersebut cukup beralasan karena tingkat peradaban demokrasi Indonesia masih berada di bawah standar, sehingga Pilihan presiden 2014 menjadi sangat krusial dan penting.¹²

Ahmad Syafii Maarif lebih jauh menekankan bahwa jika sosok presiden yang terpilih punya potensi menjadi negarawan, maka masih ada harapan demokrasi di Indonesia akan meninggalkan corak yang

¹² Ahmad Syafii Maarif, "Presiden 2014", *Kompas*, 15 Maret 2013, hlm. 6.

serba ritual dan prosedural menuju terciptanya sebuah demokrasi substansial yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.¹³ Pernyataan tersebut amat tepat karena selama ini kelemahan kepemimpinan dari seorang presiden dapat dikatakan kurang dan bahkan lemah untuk melakukan eksekusi-eksekusi yang berpihak pada rakyat. Intinya, kepemimpinan seorang presiden di masa mendatang haruslah berpegang teguh dan mengutamakan visi dan misinya yang melahirkan regulasi-regulasi baru yang berpihak pada rakyat banyak.

Ditambahkan pula, bahwa isu-isu keadilan dan kesejahteraan yang selama ini masih tergantung di awan tinggi, di bawah pimpinan para negarawan dari pucuk tertinggi sampai ke akar yang paling bawah, secara berangsur dan pasti akan menjadi kenyataan dalam formatnya yang konkret.¹⁴ Hal tersebut akan menjadi masalah serius, jika ternyata pada 2014 pemimpin atau presiden yang muncul justru miskin visi dan tuna moral, ini berarti bahwa corak masa depan Indonesia kian rontok dan terjadi tuna martabat, dan sunyi dari keadilan.¹⁵ Kepemimpinan yang kuat dan mengerti akan peta ekonomi, serta kekayaan alam Indonesia harus dapat membalik situasi saat ini menjadi kondisi yang membuat Indonesia makin berdaulat secara ekonomi dan politik. Berdasarkan peta Indonesia yang kaya akan minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya – presiden 2014 diharapkan mampu membuat strategi pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat banyak.¹⁶ Tumpuan dan harapan pada kepemimpinan seorang presiden 2014 demikian besar, dan tidak tepat kalau seolah-olah segenap permasalahan bangsa akan dapat diselesaikan oleh hanya ‘kapasitas leadership’ yang dimiliki oleh seorang presiden.

Namun, siapapun seharusnya banyak belajar dari kepemimpinan SBY selama 4 tahun terakhir ini, bahwa persoalan maupun tantangan bangsa ini yang demikian dahsyat tidak dapat hanya diatasi oleh seorang presiden. Kelemahan selama ini, seorang presiden tidak atau belum mampu menjadi motor dari gerakan atas semua hal yang dihadapi Indonesia. Perhatian terhadap kekayaan alam memang penting, demikian halnya juga dengan realisasi strategi

pembangunan nasional yang lebih baik, dan kalau perlu dapat terwujud suatu situasi ‘pembalikan’ yang drastis dan lebih baik sifatnya. Pandangan tersebut tampak tidak komprehensif sifatnya, karena kekuatan kekayaan alam Indonesia yang demikian hebat selama ini gagal untuk diangkat dan didayagunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut sebagai akibat terjadinya penyalahgunaan wewenang, salah urus, mismanajemen, serta membuat kesenjangan atas kondisi ekonomi rakyat dan elit penguasa masih demikian lebar.

Kuncinya dalam hal tersebut, Indonesia masih memerlukan visi maupun komitmen dari seorang presiden yang tidak bekerja ‘sendirian’, tapi harus mampu sekaligus melakukan penggerakan berbagai kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Intinya, berbagai kekuatan yang ada di dalam masyarakat tidak hanya sebatas digerakkan saja, tapi kekuatan gerakan masyarakat tersebut juga harus dapat diisi dengan hal-hal yang menjadi prioritas bagi keberlangsungan kehidupan bangsa ini secara menyeluruh. Perlu dilakukan inventarisasi masalah-masalah bangsa dan negara yaitu; hal-hal besar apa saja yang harus menjadi prioritas dan perhatian dari seorang presiden 2014 mendatang?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataannya, bahwa tantangan Indonesia ke depan juga harus terus menerus konsisten dengan ciri khas kehidupan politik bangsa ini yang sudah dibangun dan dikembangkan selama ini yaitu; terus membangun dan menghadirkan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.¹⁷ Lebih jauh SBY mengharapkan bahwa kalau kehadiran demokrasi yang berkualitas tersebut dapat dijaga dan dipertahankan, maka tujuan pemilu 2014 untuk menghasilkan kepemimpinan baru dapat terwujud.¹⁸ SBY yang sudah menjabat sebagai presiden dalam 2 periode dan selama 10 tahun terakhir juga amat menyadari, dan mengakui bahwa tidak mungkin cita-cita bangsa dapat diselesaikan oleh hanya seorang presiden.¹⁹ Masing-masing pihak atau pemimpin di tingkat apapun (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) mempunyai perannya sendiri, dan yang amat penting

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ “Presiden: Sambut Pemimpin Baru 2014”, *Kompas*, 15 Juni 2013, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

semua jajaran pimpinan pemerintahan tersebut juga harus sadar bahwa mewujudkan impian bangsa dalam aspek apapun adalah pekerjaan yang tidak pernah putus dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²⁰ Kuncinya, bahwa presiden 2014 haruslah seorang pemimpin yang dapat melakukan keberlanjutan dan perubahan yang tetap dapat mempertahankan kerukunan, persatuan dan toleransi bangsa Indonesia yang demikian beragam atas suku, agama, ras, dan bahasa, serta aspek-aspek etnik lainnya.

Dari hasil sejumlah survei yang dilakukan oleh berbagai pihak, menunjukkan bahwa pandangan maupun gagasan yang cemerlang dari seorang presiden di akhir tahun 2014 tidaklah cukup, demikian halnya kalau hanya tergantung pada nama-nama para calon presiden yang berkembang selama satu tahun terakhir ini. Survei menunjukkan kalau rakyat umumnya menghendaki adanya figur-figur alternatif atas calon-calon presiden mendatang, atau intinya mereka adalah muka-muka baru.²¹ Namun, lebih jauh Syamsuddin Haris, menekankan kalau figur alternatif juga harus diikuti oleh gagasan-gagasan yang bersifat alternatif pula, sekaligus pemimpin tersebut juga harus mampu merealisasikan gagasan-gagasan alternatifnya.²² Cukup beralasan dengan hal-hal yang menjadi penekanan dari peneliti LIPI tersebut, karena umumnya rakyat tidak menghendaki kalau kepemimpinan dari seorang presiden pasca 2014 hanya mengulang atau sebatas meneruskan berbagai kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Hal ini jelas bukan saja mengecewakan, tapi juga dapat membahayakan bagi masa depan bangsa dan negara. Karena berarti Indonesia dengan problema korupsinya, dan lain-lain yang demikian dahsyat tersebut makin tidak punya masa depan.

Sudah banyak pendapat yang mengharapakan bahwa presiden yang ideal pada akhir tahun 2014, haruslah mereka yang mampu keluar dari berbagai kemelut besar yang terjadi selama ini. Sebagaimana diketahui, kondisi kasus-kasus korupsi selama 15 tahun terakhir ini tampak lebih buruk dari pada kondisi Indonesia waktu mengalami krisis 1997/98. Di samping itu juga muncul para tersangka baru, dengan berbagai kasus-kasus korupsi baru, dan termasuk

hadirnya demikian besar jumlah ‘raja-raja kecil’ (para gubernur, wakil gubernur, walikota, dan bupati) di seluruh Indonesia dengan kasus korupsinya masing-masing. Lebih jauh survei yang dilakukan Harian Kompas sampai pada akhir konklusi yang cukup mencengangkan semua pihak yaitu; ‘reformasi telah berlangsung selama 15 tahun, namun kehidupan bangsa tetap kacau balau’.²³

Istilah kacau balau tersebut bukan tanpa alasan, karena problema-problema besar yang dihadapi Indonesia di era 2004-2009, tampak berlalu begitu saja. Lebih jauh, Indonesia di era 2009-2013 masih larut dengan berbagai masalah besar yang dihadapinya, dari berbagai kasus-kasus pada periode-periode sebelumnya. Karena itu, evaluasi 15 tahun setelah era reformasi (1998-1999) menunjukkan data maupun indikasi yang tidak memuaskan, dan bahkan disimpulkan kalau berbagai agenda reformasi dianggap melenceng.²⁴ Seharusnya jatuhnya Soeharto dan agenda perlunya Indonesia melakukan reformasi (*‘reform-minded’*) menjadi pelajaran penting, dan tidak dihiraukan begitu saja oleh mereka yang berada di tampuk pimpinan pemerintahan.²⁵

Berbagai hal yang menunjukkan melencengnya berbagai agenda reformasi, secara tegas diindikasikan dari beberapa indikator sebagai berikut, dan didukung oleh kompilasi data sampai akhir 2012; antara lain indeks persepsi korupsi yang masih tinggi (skor 32), indeks implementasi tata pemerintahan Indonesia (peringkat ke-46 dunia), stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan (peringkat ke-24), efektifitas pemerintah (peringkat ke-47), kualitas regulasi (peringkat ke-43), penegakan hukum (peringkat ke-34), pemberantasan korupsi (peringkat ke-28), kebebasan berpolitik belum terpenuhi 19,2%, dan otonomi daerah yang seluas-luasnya belum terpenuhi disimpulkan dengan prosentase 58,2%.²⁶

Dari hasil survei tersebut, banyak hal justru melenceng dari agenda reformasi. Fakta riil adalah penegakan hukum lemah, korupsi semakin massif, kesejahteraan rakyat

²⁰ *Ibid.*

²¹ “Rakyat Ingin Figur Alternatif”, *Kompas*, 30 Mei 2013, hlm. 1.

²² *Ibid.*, hal.15.

²³ “Agenda Reformasi Melenceng”, *Kompas*, 20 Mei 2013, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 175-219.

²⁶ *Ibid.*

rendah, dan demokrasi kualitasnya masih rendah, dan kian pragmatis serta mahal.²⁷ Di samping itu, terjadi politik dinasti di mana-mana, sehingga tidak terjadi dengan apa yang disebut ‘konsolidasi demokrasi’.²⁸ Hal-hal yang bersifat menyimpang dalam hal praktik-praktik politik (politik uang, dsbnya), sengaja dibiarkan, dan dibuat permanen, sehingga elite pemerintahan yang berkuasa dapat turut mengambil keuntungan dari situasi tersebut.²⁹ Demokrasi yang berjalan sampai awal 2013 ini bukan bersifat substansial, hal ini membuat biaya politik menjadi tinggi dan menyebabkan banyak orang terjerat dengan ‘korupsi baru’.³⁰ Semua indikator tersebut makin memperkuat pendekatan komprehensif makro dan mikro ekonomi yang dilakukan oleh Michael E. Portillo, bahwa Indonesia dengan tingkat kompetisinya di ASEAN tampak masih rendah (termasuk ranking 5, setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam) dengan skor 79, adalah evaluasi yang tidak berdiri sendiri atau merupakan ‘isapan jempol’ dari para pengamat tersebut.³¹ Namun, Indonesia benar-benar berhadapan dengan berbagai indikator makro ekonominya yang cukup bermasalah, dan ditampilkan oleh survei Harian Kompas tersebut. Dengan demikian tantangan bagi presiden Indonesia mendatang cukup besar.

Selanjutnya, di bidang ekonomi khususnya tidak hanya ketangguhan ekonomi Indonesia yang diuji, namun secara riil dalam 4 tahun terakhir ini Indonesia terus mengalami defisit neraca pembayarannya, dan khusus untuk 2013 penerimaan negara turun 41,1 triliun rupiah dan belanja negara membengkak menjadi 39 triliun rupiah, sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melebar menjadi 80,1 triliun rupiah.³² Lebih jauh, ditengah perekonomian global yang masih lesu dan kondisi politik Indonesia menjelang Pemilu 2014, perekonomian Indonesia menghadapi beragam tantangan dan peluangnya sendiri.

Di luar itu semua, ketangguhan perekonomian Indonesia masih terletak pada kekuatan konsumsi domestik (sektor riil).

Kendatipun peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut masih ada. Namun perkembangannya sebatas mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, dan belum dapat diandalkan untuk mewujudkan suatu pendapatan kelas menengah yang menyakinkan dan basis bagi penopang pertumbuhan industri yang maju dan canggih. Sebagai perbandingan, arah pertumbuhan ekonomi China (sejak April 2013) menuju pada rata-rata pendapatan nasionalnya berkisar 17.000 dolar AS (kini China sudah berada di tingkat 9.000 dolar AS). Kalau hal itu terwujud dalam 3-5 tahun mendatang, maka China dapat keluar dari konstelasi ‘*Middle Income Trap*’-nya.³³ Intinya, pertumbuhan ekonomi China sekaligus dapat menjamin tumbuh-kuatnya kelas menengahnya, dengan pendapatan hasil pajaknya sekaligus dapat diandalkan bagi pengembangan basis industri canggih yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Pola ini sudah berhasil dilakukan oleh Jepang, dan beberapa negara lainnya (AS, Jerman, Perancis, Inggris, India, Rusia, Brazil, dan Afrika Selatan).³⁴

Namun, kondisi ekonomi ‘Indonesia 2012-13’ dengan konsumen pasar domestiknya yang demikian besar (240 juta penduduk), masih tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi investor global, misalnya revitalisasi industri, proses konstruksi, infrastruktur, tren urbanisasi, dan tingkat utang luar negeri yang tetap terjaga.³⁵ Secara menyeluruh kondisi ekonomi Indonesia pada 2012 dibandingkan tahun 1997, khususnya ada kenaikan pada beberapa hal yaitu PDB (8.241,86 triliun rupiah berbanding 627,70) dan pertumbuhan ekonomi (6,27% berbanding 4,65%), inflasi (4,3% berbanding 10,27%), dan penerimaan APBN (1,358.205.0 milyar rupiah berbanding 108.183.8), dan indikator lainnya (utang luar negeri, 126,12 juta dollar berbanding 137,42, kegiatan sektor pertanian 14,44% berbanding 16,09%, kegiatan sektor industri 23,94% berbanding 26,79%, dan suku bunga BI 5,75% berbanding 19,74%). Khusus untuk kegiatan sektor pertanian dan industri nominal harga berlaku dalam milyar rupiah.³⁶

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Michael E. Portillo et. al, *op.cit.*

³² “Defisit Rp. 80,4 Trilyun”, *Kompas*, 17 Mei 2013, hlm. 17.

³³ ‘BRICS Challenge The Western Order’, *Gulf News*, 28 March 2013, hlm. 2-3.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ “Ketangguhan RI Diuji”, *Kompas*, 17 Mei 2013, hlm. 17.

³⁶ “Ketimpangan Makin Lebar”, *Kompas*, 17 Mei 2013, hlm. 1.

Di samping indikator ekonomi Indonesia (2012) yang membaik tersebut, namun situasi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif. Kenyataannya, ketimpangan ekonomi pasca 15 tahun reformasi masih terjadi dan makin melebar, serta distribusi kekayaan masih berada di tangan segelintir orang. Intinya, demokrasi ekonomi dan desentralisasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan belum berjalan secara optimal, dan dapat dikatakan terjadi penyalahgunaan kebijakan (regulasi yang ada belum berpihak penuh pada rakyat banyak).³⁷ Ekspansi, pengerukan sumber daya alam makin besar, dan di sisi lain reformasi telah mengorbankan sektor pertanian yang seharusnya menjadi pilar dalam pemerataan ekonomi.³⁸

Menyangkut ketimpangan yang makin melebar tersebut, terutama disebabkan asset APBN hampir 75% dikuasai oleh segelintir orang (300 orang). Di sisi lain hal ini diikuti oleh ketimpangan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, yang terus meletupkan persoalan politik dan ekonomi, tetapi hal itu 'dapat diatasi sementara' karena dikelola melalui pendekatan patronase.³⁹ Orde Reformasi berupaya melakukan koreksi agar ada persaingan berusaha yang adil dan kegiatan ekonomi lebih menyebar. Konsentrasi ekonomi pada segelintir orang berusaha dihilangkan. Namun, pemerintah memilih liberalisasi perdagangan finansial, investasi dan tenaga kerja. Di samping pemerintah melakukan perubahan tata kelola proses pemberian kewenangan untuk pemerataan pembangunan melalui desentralisasi di level mikro ekonomi.⁴⁰

Gambaran tersebut cukup memprihatinkan, terutama soal ketimpangan ekonomi dan regulasi politik yang tidak berpihak pada rakyat banyak, ditambah lagi soal ketidakpastian penanganan korupsi dan KKN selama ini, dan semua itu akan menjadi pilar-pilar penting yang akan dihadapi oleh presiden Indonesia mendatang (pasca 2014). Masyarakat dan banyak pihak umumnya berkeinginan kuat kalau soal-soal yang dijelaskan tersebut di atas, dan khususnya korupsi dan KKN harus dapat diatasi atau dihentikan. Membiarkan berbagai permasalahan ekonomi-politik tersebut, bukan saja merusak

tatanan kehidupan politik dan ekonomi bangsa di tingkat domestik. Namun lebih dari itu, secara eksternal makin lama Indonesia makin tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi soal isu kompetisi perdagangan, dan termasuk agenda besar ASEAN (Komunitas ASEAN 2015). Berbagai kondisi Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan, dan kepemimpinan bagi presiden terpilih pada akhir tahun 2014 nanti harus dapat keluar dari situasi yang monoton tersebut. Tampaknya berbagai masalah yang dihadapi Indonesia yang demikian komprehensif, haruslah dimulai dengan suatu kepemimpinan presiden yang siap memberikan prioritas pada penanganan pemberantasan korupsi, dan terwujudnya efisiensi kehidupan birokrasi di seluruh daerah (dari pusat sampai ke pelosok desa-desa).

Salah satu konklusi penting dari berbagai problema Indonesia tersebut, juga ditegaskan oleh Presiden SBY bahwa calon presiden di masa mendatang harus benar-benar memahami berbagai masalah bangsa.⁴¹ Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan lainnya di masa mendatang yaitu meliputi; bidang ekonomi (Indonesia berhadapan dengan kondisi ekonomi global yang belum terbebas dari resesi dunia), bidang politik (perlu direalisasi konsolidasi demokrasi yang matang dan berkualitas), bidang sosial (masyarakat perlu makin rukun dan toleran), dan di bidang hubungan internasional (perlu memahami posisi Indonesia sebagai kekuatan regional dan pemain global).⁴²

Tidak ada yang salah dari penjelasan SBY tersebut, tetapi ternyata SBY tidak menyinggung soal virus korupsi di Indonesia yang sudah demikian kronis, dan masih tampak bahwa rejim SBY kurang serius, dan kurang tegas, sehingga tidak tampak momentum efek jera yang dapat menjadi pelajaran besar. Asep Salahudin justru berpandangan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian SBY tidak akan banyak manfaatnya, kalau soal korupsi yang menggurita terus membuat negara makin tidak berdaya, dan kehilangan roh kemerdekaan atas rakyatnya.⁴³ Lebih jauh ditegaskan bahwa semua problema bangsa akhirnya terpusat,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ "Pemimpin, SBY: Capres Harus Paham Masalah Bangsa", *Kompas*, 20 Juni 2013, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Asep Salahudin, "Politik "Sang Kyai", *Kompas*, 21 Juni 2013.

dan dapat disebut sebagai ‘salah urus’.⁴⁴ Soal korupsi dan salah urus negara selama ini sebaiknya menjadi perhatian besar dari semua calon presiden Indonesia mendatang, dan tidak ada resep ajaib atau kiat-kiat yang dapat mengatasi problema Indonesia terutama hanya dengan mengandalkan berbagai kelebihan ataupun kekuatan yang dimiliki secara personal oleh seorang pemimpin.

Menyangkut soal plus-minus bagi kepemimpinan presiden mendatang diulas oleh berbagai referensi kepustakaan akhir-akhir (2012-2013), tampak umumnya para penulis masih terlalu menekankan pada pentingnya aspek-aspek yang bersifat kekuatan individu yang dimilikinya, dan terkait dengan soal bakat, mental, serta pengalaman yang dimilikinya selama ini. Berbagai nama pemimpin di Indonesia dan hidup di masa lalu seperti; Sukarno, M. Hatta, Sutan Syahrir, M. Natsir, Agus Salim, R. A. Kartini, Supomo, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Hoegeng, dll, memang demikian hebat *leadership*-nya, dan mereka semua itu dianggap pemimpin yang dirindukan, serta secara khusus merefleksikan karakteristik yang paham akan keinginan rakyat, dan juga dekat dengan rakyat.⁴⁵ Kelebihan dan kekuatan kepemimpinan yang bersifat personal tersebut, tidak mungkin diturunkan begitu saja kepada pihak lain atau menjadi ciri utama dari presiden Indonesia mendatang, dan secara otomatis sifatnya. Intinya, terdapat 2 hal utama yaitu; pertama, tidak ada kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang presiden di suatu era pemerintahan dapat diturunkan secara total sama polanya terhadap pemimpin lainnya. Kedua, bagi setiap pemimpin umumnya masing-masing menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu sama, karena itu karakteristik setiap pemimpin mempunyai orientasi dan kepentingannya sendiri.

Been Rafanany melihat aspek kepemimpinan lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh hebat dan harus ditiru, misalnya seorang pemimpin harus berani mengambil resiko yang paling besar, harus mencintai apa yang dikerjakannya, bebas rasa malas, ahli di bidangnya, jujur dalam segala hal, mengelola keuangan dengan baik,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ S. B. Pramono & Dessy Harahap, *Pemimpin Yang Dirindukan, Refleksi Karakteristik Kerakyatan*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2013), hlm. III.

tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, fokus pada kekuatan yang dimilikinya, kerja keras, dan memotivasi diri dengan kompetisi, dll.⁴⁶ Tidak ada yang salah ataupun yang perlu ditolak dari berbagai ciri kepemimpinan yang perlu ditiru, dan perlu dipertimbangkan bagi presiden Indonesia di masa mendatang, tetapi semua itu masih harus diuji keberhasilannya dalam menghadapi berbagai prioritas tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Intinya, kelebihan maupun kekuatan personal seorang pemimpin tetap masih harus diuji, tidak cukup hanya ditiru dan ternyata tidak sesuai dengan tuntutan zamannya.

Di luar itu fenomena Jokowi (kini Gubernur DKI Jakarta, 2013-2018) banyak mendapat tempat dan sorotan dari berbagai pengamat, misalnya saja secara khusus Been Rafanany mengulas berbagai kebiasaan Jokowi yang amat sederhana, dan mencintai semua produk maupun kebiasaan yang banyak dilakukan oleh rakyat dan bersifat lokal, misalnya lebih memilih makanan Indonesia (gudeg, dll).⁴⁷ Karena itu Jokowi dianggap ideal sebagai pemimpin masa depan bagi Indonesia, ia dekat dengan rakyat, dan pasti kebijakan serta perhatiannya akan condong pada rakyat banyak.

Ditambahkan oleh Charles Adi Prasodjo, memang Jokowi kini banjir dukungan, dan cukup fenomenal dengan prestasinya sebagai wali kota terbaik di dalam negeri (Wali Kota Surakarta, Solo), dan kini masuk dalam 25 besar kandidat Calon Wali Kota terbaik dunia.⁴⁸ Di samping itu, konteks personal Jokowi memang tidak hanya fenomenal, namun ketulusan dan kepolosannya pada saat ini (2013) hanya Jokowi-lah yang cukup mempesona. Kepada Yon Thayrun, Jokowi dengan polos menyatakan; ‘yang paling sulit saat ini adalah mengalahkan diri sendiri’.⁴⁹ Hal tersebut menimbulkan simpati tersendiri bagi kaum muda umumnya (dengan potensi sekitar 50 juta kaum muda sebagai pemilih baru, 2014).

⁴⁶ Been Rafanany, *Kebiasaan-Kebiasaan Tokoh Hebat di Seluruh Jagad Yang Harus Anda Tiru*, (Yogyakarta: Penerbit Araska, 2013), hlm. 5-150.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Charles Adi Prasodjo, *Matahariku Indonesiaku!, Gebrakan Orang-Orang Indonesia Fenomeal Terkini Membasmi Kezhaliman*, (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2012), hlm. 5-6.

⁴⁹ Yon Thayrun, *Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker*, (Penerbit NouraBooks, 2012), hlm. 236-7.

Konteks personal kepemimpinan Jokowi mempunyai kekuatan tersendiri, dan tampaknya tidak bertentangan dengan falsafah kepemimpinan orang Jawa pada umumnya. Seorang pimpinan yang berasal dari keturunan Jawa, harus memperhatikan prinsip Jawa-Jawi, dan merupakan khalifatullah (wakil Tuhan) yang senantiasa bersifat etis, estetis, serta berperan aktif dalam turut melakukan *hame-mayu hayuning bawana* (menjaga keselamatan alam beserta isinya, serta bangsa dan negaranya).⁵⁰ Jelas prinsip falsafah tersebut dipahami oleh mereka (Soeharto, Sri Sultan HB IX, dan Jokowi) yang berasal dari Jawa, dan masing-masing dalam prakteknya tampil dengan penekanan '*leadership*' di atas situasi yang berbeda antar satu dan lainnya. Dalam hal itu, Jokowi tampaknya tampil dengan corak kepemimpinannya bersifat anti-klimaks dari dua nama besar lainnya tersebut. Jokowi tampak lebih manusiawi, dan lebih menjaga keselamatan alam dan lainnya secara berimbang. Namun tetap '*leadership*' Jokowi masih harus diuji, dan masih dalam proses, dan khususnya semua masalah tidak dapat dihadapi oleh seorang pemimpin saja. Demikian pula soal kerjasama, dan terkait dengan kemampuan melakukan penggerakkan berbagai kekuatan di dalam masyarakat juga ditentukan oleh kepemimpinan seseorang yang bersifat praktis dan konkrit.

Di luar fenomena Jokowi, persoalan pengujian dari ambisi kepemimpinan seorang presiden tampak menjadi perhatian M. Sabri S. Shinta yang melihat Presiden SBY tersandera dengan komitmen-komitmen politiknya, dan khususnya dalam melaksanakan pemerintahan yang lebih efektif dan stabil, sehingga kombinasi sistem presidensial dan sistem kepartaian yang dapat berjalan mulus ternyata tidak mudah.⁵¹ Sistem presidensial tampaknya harus didukung oleh sistem multi-partai yang sederhana, dan diharapkan dengan kombinasi tersebut efektifitas pemerintahan dapat terwujud.

Salah satu syarat terwujudnya sistem multi-partai yang sederhana tersebut, yaitu

⁵⁰ Sri Wintala Achmad, *Falsafah Kepemimpinan Jawa, Soeharto, Sri Sultan HB IX & Jokowi*, (Yogyakarta: Penerbit Araska, 2013), hlm. 26.

⁵¹ M. Sabri S. Shinta, *Presiden Tersandera; Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai Terhadap Relasi Presiden-DPR di Masa Pemerintahan SBY-Boediono*, (Penerbit RMBOOKS, 2012), hlm. 153.

melalui heterogenitas partai yang dapat bersifat kompromis, dan persepsi maupun pandangan antar partai menyangkut sistem politik Indonesia harus dapat dikendalikan, serta melahirkan proses pengambilan keputusan yang solid dan tidak parsial. Ini menjadi tantangan bagi SBY selama ini, karena 'faktor personal' SBY sendiri bagi partai-partai lainnya (di luar Partai Demokrat) belum cukup menyakinkan sebagai pengendali yang solid dan kharismatik. Demikian pula dengan visi anti korupsinya SBY yang dianggap merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan sejarah bangsa dan negara Indonesia,⁵² tampak masih harus diuji validitasnya dan diperlukan *cross-check* dengan hal-hal lainnya. Misalnya seberapa jauh kasus SPT presiden dan keluarganya tersebut benar-benar valid, serta soal masuknya dana untuk Lapindo dalam APBN (apakah benar karena sementara kalangan berpendapat ada permainan di tingkat elit eksekutif dan legislatif dalam soal itu?).

Tampak kalau A. Bakir Ihsan & Zaenal A. Budiyo masih demikian naif dalam mengevaluasi sosok SBY khususnya, dan hanya bersifat sepihak saja (seolah-olah 'fakta-fakta SBY dan Partai Demokrat' tidak perlu diproses kebenarannya). Justru dengan berbagai kasus korupsi di Partai Demokrat, ternyata SBY sendiri sulit untuk melakukan manuver politiknya, bahkan SBY secara gamblang menyatakan, 'meminta kesiapan mental para kader partai jika Demokrat kalah dalam pemilu mendatang (2014)'.⁵³ Hal ini amat dimungkinkan sebagai akibat terjadinya *swing-voter* yang cukup potensial, dan diperkirakan oleh Burhanuddin Muhtadi kalau sisa pemilih Partai Demokrat hanya tinggal satu pertiga dari hasil pemilu 2009, dan dua pertiga pemilih Demokrat tampaknya akan pindah ke partai lainnya.⁵⁴ Perlu ditambahkan, situasi tersebut terutama pada pasca digantinya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ternyata popularitas Partai Demokrat bukan tambah baik, dan mungkin saja lebih dari dua pertiga pemilihnya pada 2009 yang lalu akan pindah untuk memilih partai politik lainnya.

⁵² A. Bakir Ihsan & Zaenal A. Budiyo, *Pemimpin Dipuji & Dicaci: Realitas Demokrasi Indonesia kini*, (Jakarta: Penerbit Expose, 2013), hlm. 14-5.

⁵³ Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*, (Jakarta: Penerbit Noura Books, 2013), hlm. 323.

⁵⁴ *Ibid.*

Menyimak Konteks Kepemimpinan Politik di Singapura

Di luar fenomena SBY maupun Jokowi yang amat populer akhir-akhir ini, dan memperhatikan perkembangan kepemimpinan politik di Singapura, bukanlah berarti pandangan pada penulisan ini akan menempatkan para pemimpin di Singapura lebih baik, maupun lebih menentukan bagi perkembangan dan soal presiden Indonesia di masa mendatang (pasca 2014). Hanya perlu digarisbawahi bahwa maju dan kuatnya perkembangan Singapura sebagai negara yang paling kompetitif di muka bumi ini termasuk ranking 1, serta skor indeks negaranya yang paling bersih melalui penerapan prinsip *good governance*-nya (10 besar dunia), jelas tidak lepas dari kepemimpinan dan kemauan politiknya yang demikian kuat untuk memberantas masalah korupsi yang demikian kronis sejak 54 tahun yang lalu.

Berbagai konsep yang bersifat mendukung kepemimpinan politiknya selama ini terutama menghadapi soal korupsi yang demikian kronis di Singapura, dan sejak Juni 1959 tampak pemerintah People Action's Party (PAP) Singapura secara konsisten, memberi prioritas utama atas hal tersebut.⁵⁵ Pemerintah Indonesia pasca reformasi tidak dapat menutupi ataupun mengalihkan perhatian, dan seolah-olah problema korupsi bukan menjadi prioritas utama. Seharusnya Indonesia bertindak lebih arif, dan secara strategis menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan berkesinambungan selama periode 15 tahun (1998-2013). Tidak dapat diabaikan kalau rejim Orde Baru tampak masih demikian kuat pengaruhnya, sehingga para pemimpin bangsa di era reformasi tidak dapat berbuat banyak.

Sejak tahun 1959 pemerintah Singapura melakukan misi utamanya yaitu dengan meminimalisir semua bentuk korupsi, dengan melakukan perubahan atas persepsi publik atas korupsi yang harus diturunkan derajatnya seminimal mungkin dan menjadi problema yang beresiko rendah, pemberian hadiah pada aktivitas korupsi yang berdimensi dahsyat harus dilakukan, dan pada resiko yang kecil juga diberikan ganjaran yang setimpal.⁵⁶ Di samping prioritas lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura yaitu memperkuat 2

lembaga anti korupsi Singapura, yaitu POCO (*Prevention of Corruption Ordinance*) dan CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*), sebagai strategi komprehensif anti korupsi di negara tersebut dan efektif berlaku sejak tahun 1960.⁵⁷

Perlu dipahami bahwa pemerintahan PAP Singapura sendiri tidak tinggal diam, atau membiarkan CPIB berjalan sendiri, namun CPIB mendapat dukungan kuat dalam hal; *paying competitive salaries to political leaders, and senior bureaucrats, cutting red tape, and using e-government to minimize opportunities for corruption*.⁵⁸ Kebijakan tersebut berlanjut terus sampai April 1991, dan lebih serius lagi PAP menciptakan *Service Improvement Unit*, hal ini dirasakan penting karena penundaan pelayanan publik yang sering terjadi dan terkait dengan istilah '*red tape bureaucracy*' harus dapat dicegah, terutama dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik oleh pihak birokrasi secara konsisten.⁵⁹ Pemerintah PAP Singapura tampaknya memang tidak ragu-ragu dalam soal pemberantasan korupsi tersebut, dan orientasinya juga harus berdimensi pada korupsi 'kelas kakap', hal ini ditekankan bahwa, *If the big fish (rich and famous person) are immune from prosecution for corruption, and the anti-corruption agency focuses its energies on catching only 'small fish' (ordinary people), and as a result the anti-corruption strategy lacks credibility and is doomed to failure*.⁶⁰ Pandangan tersebut, terus diperkuat dan didukung oleh (1) *there must be comprehensive anti-corruption legislation to prevent loopholes and periodic review of such legislation to introduce amendments whenever necessary*; (2) *the second indicator of a government's political will is its provision of adequate legal powers, personnel, and budget to enable the anti corruption agency to perform its functions effectively*.⁶¹

Dari kasus pemberantasan korupsi di Singapura tersebut, Jon S.T. Quah menyarankan pada negara-negara di Asia (Korea Selatan, Thailand, India, Philipines, dan Indonesia), harus mampu mendemonstrasikan kemauan politiknya melalui; '*increasing substantially*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Jon S.T. Quah, *op.cit.*, hlm. 189.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 191.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 192.

⁵⁵ Jon S.T. Quah, *op.cit.*, hlm. 176.

⁵⁶ *Ibid.*

*the legal powers, personnel, and budgets of their anti-corruption agencies.*⁶² Lebih jauh lagi, Jon S. T. Quah mengkritik dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pembentukan task-force anti korupsi pada instansi lainnya di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2005 yang dapat menjadi pesaing dan melucuti kekuasaannya; antara lain dikatakan, *'Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono had unwittingly undermined its effectiveness in May 2005 when he formed an anti-corruption taskforce of prosecutors, police, and auditors to compete with the KPK.'*⁶³

Strategi lain yang juga dianggap penting oleh pemerintah PAP Singapura, bahwa dalam perihal pemberantasan korupsi seorang pemimpin pemerintahan tertinggi harus dapat independen dan tidak terlibat dalam kepentingan pengawasan politik pada dua hal; pertama, pimpinan pemerintahan tidak boleh terlibat atau ikut campur dalam operasi sehari-hari dari lembaga yang setaraf dengan *anti-corruption agency*, kedua, dan menjadi amat penting bahwa *'anti-corruption agency should be able to investigate political leaders and senior civil servants without fear and favor if they are accused of corruption.'*⁶⁴ Strategi lainnya, bahwa pihak POCO dan CPIB serta para anggotanya tidak boleh terlibat korupsi, hal ini dapat mengakibatkan peran mereka tidak efektif dan hilang kredibilitasnya.⁶⁵

Di samping itu, pemerintah PAP amat sadar bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tindakan aksinya baru dilakukan setelah suatu transaksi korupsi terjadi, dan tindakan korupsi secara komprehensif harus didukung oleh perbaikan gaji atau pendapatan atas seluruh staf maupun mereka yang bekerja di birokrasi pemerintahan dan instansi maupun institusi pemerintahan lainnya. Karena bagaimanapun pendapatan yang rendah dari seorang pegawai, adalah cikal bakal dan awal dari motivasi terjadinya korupsi.⁶⁶

Penutup

Dari kasus Singapura tersebut tanpa jelas, bahwa implikasinya terhadap presiden Indonesia mendatang tidak dapat hanya

mengandalkan fenomena kepemimpinan yang bersifat individual. Kelebihan maupun kekuatan personal seorang pemimpin juga tergantung pada kesadarannya bahwa untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang demikian besar tidak dapat diatasi sendiri. Indonesia memang menghadapi banyak masalah, namun penulisan ini tetap melihat bahwa masalah korupsi dan KKN dalam bentuk luas harus lebih diutamakan dan menjadi prioritas paling penting. Ini telah ditunjukkan oleh Singapura bahwa sehebat apapun potensi suatu bangsa dengan kualitas sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya, namun tidak akan banyak berbicara baik secara internal domestik maupun eksternal kalau kualitas pembangunan di negara tersebut negatif. Untuk itu perlu disepakati dan diketahui oleh semua pihak bahwa faktor yang mempunyai daya rusak tinggi pada bangsa dan negara adalah korupsi/KKN. Singapura amat sadar akan penyakit kronis tersebut yang dapat menghancurkan kualitas bangsa dan negaranya. Karena itu harapan pada kepemimpinan presiden Indonesia di masa mendatang (pasca tahun 2014), mau tidak mau soal korupsi harus menjadi prioritas utama, dan tidak boleh dibiarkan kembali berlalu.

Dari kasus Singapura tersebut, dan dibalik soal kepemimpinan seorang kepala negara maupun perdana menteri, mereka dari waktu ke waktu secara serius membangun berbagai *'authorities'*, di mana prinsip tersebut makin diperkuat dan diperankan oleh berbagai lembaga (CPIB, POCO, legislasinya, dan lain-lain). Karena itu makin lama terciptalah dengan apa yang disebut *'multiplication of authorities'*, yaitu otoritas kekuasaan negara yang berlapis, dan solid satu sama lain, serta dikontrol secara bersama-sama oleh semua pihak yang punya wewenang dan otoritas tersebut.

Oleh sebab itu, suatu pandangan yang menyimpulkan bahwa gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan pula oleh tidak adanya kontrol masyarakat, maka hal itu tetap sulit untuk menjadi faktor penentu suatu keberhasilan.⁶⁷ Bagaimanapun berbagai mekanisme yang dibentuk untuk memberantas korupsi jelas memerlukan hadirnya kemauan politik yang kuat di tingkat pemerintahan, dan dukungan berbagai otoritas lainnya. Dari hasil observasi atas kasus Singapura tersebut,

⁶⁷ Iwan Gardono Sujatmiko, "Korupsi dan Gerakan Sosial", *Kompas*, 25 Agustus 2012, hlm. 6.

⁶² *Ibid.*, hal. 193.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jon S.T. Quah, *op.cit.*, hlm. 194.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 194-8.

makin jelas bahwa kemauan politik juga memerlukan taktik dan strategi yang jitu dari seorang pemimpin tertingginya, yaitu kemauan politik yang kuat dari seorang presiden juga harus diikuti dengan pembangunan berbagai kekuatan lainnya yang benar-benar dapat menjamin terealisirnya pemberantasan korupsi secara optimal dan kredibel. Singapura dengan kepemimpinan politiknya secara tidak langsung telah menerapkan konsep ‘*Multiplication of Authorities*’ tersebut.⁶⁸ Secara tidak langsung dengan penerapan konsep tersebut, Singapura sudah terbukti berhasil, dan kemudian diikuti oleh China. Karena itu, bagi presiden Indonesia mendatang mau tidak mau harus memperhitungkan relevansi konsep tersebut, dan tidak terlena pada hanya fenomena kekuatan personal seorang calon presiden.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad, Sri Wintala. 2013. *Falsafah Kepemimpinan Jawa: Soeharto, Sri Sultan HB IX & Jokowi*. Yogyakarta: Penerbit Araska.
- Asia Competitiveness Institute. 2010. *ASEAN Competitiveness Report*. Singapore: National University Singapore.
- Chong, Terence (Ed.). 2010. *Management of Success: Singapore Revisited*. Singapore: ISEAS.
- Djafar, Zainuddin. 2006. *Rethinking The Indonesian Crisis*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ihsan, A. Bakir, & Zaenal A. Budiyono. 2013. *Pemimpin Dipuji & Dicaci: Realitas Demokrasi Indonesia Kini*. Jakarta: Penerbit Expose.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*. Jakarta: Noura Books.
- Portillo, Michael E., Marn-Heong Wong, Rakhi Shankar, Ruby Toh, and Christian Ketels,
- Pramono S. B., Dessy Harahap. 2013. *Pemimpin Yang Dirindukan: Refleksi Karakteristik Kerakyatan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Prasodjo, Charles Adi. 2012. *Matahariku Indonesiaku!: Gebrakan Orang-Orang*

Indonesia Fenomenal Terkini Membasmi Kezhaliman. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.

- Quah, Jon S.T. 2010. *Public Administration Singapore Style*. Singapore: Emerald Group Publishing.
- Rafanany, Been. 2013. *Kebiasaan-Kebiasaan Tokoh Hebat di Seluruh Jagad Yang Harus Anda Tiru*. Yogyakarta: Penerbit Araska.
- Rosenau, James N, The Study of World Politics (Vol.2), Globalization and Governance, Routledge, London, UK, 2006.
- Shinta S, M. Sabri. 2012. *Presiden Tersandera: Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidential Multipartai Terhadap Relasi Presiden-DPR di Masa Pemerintahan SBY-Boediono*. Penerbit RMBOOKS.
- Suparno, Basuki Agus. 2012. *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Thayrun, Yon. 2012. *Jokowi, Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker*. Jakarta: Noura Books.
- Vatikiotis, Michael R. J. 1998. *Indonesian Politics Under Soeharto, The Rise and Fall of The New Order*. London & New York: Routledge.

Laporan dan Makalah

- Zainudin Djafar dan Tim. 2011-2012. “Lemahnya Pemberantasan Korupsi, dan Inefisiensi Birokrasi, Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Indonesia dengan ASEAN 3 (Singapura, Malaysia, dan Thailand)”. Jakarta: RU UI, DRPM UI.

Surat Kabar dan Website

- Ahmad Syafii Maarif. 2013. “Presiden 2014”. *Kompas*. 15 Maret.
- “Agenda Reformasi Melenceng”. 2013. *Kompas*. 20 Mei.
- Asep Salahudin. “Politik ‘Sang Kyai’”. 2013. *Kompas*. 21 Juni.
- “BRICS Challenge The Western Order”. 2013. *Gulf News*. 28 Maret.
- Iwan Gardono Sujatmiko. 2012. “Korupsi dan Gerakan Sosial”. *Kompas*. 25 Agustus.
- “Pemimpin, SBY: Capres Harus Pahami Masalah Bangsa”. 2013. *Kompas*. 20 Juni.
- “Presiden: Sambut Pemimpin Baru 2014”. 2013. *Kompas*. 15 Juni.

⁶⁸ James N. Rosenau, *op.cit.*, hlm. 13-18.

- “Rakyat Ingin Figur Alternatif”. 2013. *Kompas*. 30 Mei.
- “Defisit Rp. 80,4 Trilyun”. 2013. *Kompas*. 17 Mei.
- “Ketangguhan RI Diuji”. 2013. *Kompas*. 17 Mei.
- “Ketimpangan Makin Lebar”. 2013. *Kompas*. 17 Mei.
- “Dicari Pemimpin Mau Urus Rakyat”. 2013. *Kompas*. 31 Mei.